

PENGHAPUSAN PENDIDIKAN DIKOTOMIS: LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF TAHUN 1938-1975

DELETION OF DICOTOMIC EDUCATION: MA'ARIF EDUCATION INSTITUTIONS IN 1938-1975

Oleh: Hafizh Haikal Amrullah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, hafizh.amrullah008@gmail.com

Abstrak

Munculnya dikotomi antara ilmu pendidikan agama dan umum telah menjadi problematika dalam perkembangan pendidikan Islam awal abad ke-20. Adanya dikotomi pendidikan agama dan umum telah menjadi pemicu terbentuknya madrasah oleh kalangan modernis. Namun, ketika kalangan modernis memandang bahwa pesantren sudah tidak relevan dalam pendidikan Islam, para pendidik pesantren mulai membentuk organisasi yang mewadahi kepentingan tradisional bernama Nadhlatul Ulama (NU) yang nantinya akan menaungi Lembaga Pendidikan Ma'arif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penghapusan pendidikan dikotomis yang dilakukan LP. Ma'arif sehingga nantinya berdampak pada perkembangan LP. Ma'arif tahun 1938-1945. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal pendirian LP. Ma'arif terdapat beberapa tantangan yaitu kurangnya sistem pengorganisasian, dan masih sedikit dalam menambahkan mata pelajaran umum. Akan tetapi setelah modernisasi pendidikan oleh KH. A. Wahid Hasyim pada tahun 1938, secara tahap demi tahap LP. Ma'arif terus mengalami peningkatan baik dari segi kurikulum maupun jenjang pendidikan, sehingga pada tahun 1938-1975, LP. Ma'arif telah menaungi jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.

Kata kunci: Lembaga Pendidikan, Ma'arif, Dikotomi.

Abstract

The emergence of a dichotomy between religious and general education has been a problem in the development of Islamic education in the early 20th century. The dichotomy of religious and general education has triggered the formation of madrasa by modernists. However, when modernists consider pesantren to be irrelevant in Islamic education, pesantren educators begin to form an organization that accommodates traditional interests called the Nadhlatul Ulama (NU) which later will overshadow the Ma'arif Education Institute. This study aims to determine the form of dichotomous education elimination by LP. Ma'arif so that later it will have an impact on the development of LP. Ma'arif in 1938-1945. The results of this study indicate that at the beginning of the establishment of LP. Ma'arif, there are several challenges to lack of an organizational system, and there is still little in adding general subjects. However, after the modernization of education by KH. A. Wahid Hasyim in 1938, step by step LP. Ma'arif continued to increase both in terms of curriculum and education level, so that in 1938-1975, LP. Ma'arif has overseen education level from kindergarten to tertiary institutions.

Keyword: Education Institute, Ma'arif, Dichotomy.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya para *mubaligh* yang melakukan dakwah baik secara pribadi maupun kolektif untuk menyiarkan agama Islam. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah, maka mulailah mereka membangun masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang biasanya muncul di samping kediaman para ulama atau mubaligh. Pada perkembangan selanjutnya mulai muncul lembaga pendidikan Islam lainnya seperti pesantren¹, dayah, dan surau. Ketiga

nama tersebut memiliki perbedaan dari segi tempat, namun lembaga pendidikan tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama, yakni sebagai tempat belajar agama Islam.²

Adapun materi yang disampaikan lembaga pendidikan Islam tersebut ialah mempelajari ilmu-ilmu agama yaitu dengan belajar kitab-kitab klasik. Kitab klasik tersebut menjadi tolak ukur tingginya ilmu agama pada masa itu.³ Kitab yang dipelajari memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dimulai dari awal, menengah, dan atas, sehingga seorang santri pemula harus memahami kitab-kitab awal, sebelum mempelajari kitab-kitab pada tingkatan selanjutnya.⁴

¹ Pesantren menurut M. Arifin berarti suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada dibawah dari seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal, lihat Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi*

Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2005). hlm 2.

²Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 1-2.

⁴*Ibid.*, hlm. 69.

Munculnya dikotomi pendidikan di Indonesia bermula saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat melalui politik etis. Sistem pendidikan tersebut memang sangat berlawanan dengan pendidikan Islam dikarenakan pendidikan kolonial bersifat sekuler yang artinya tidak mengajarkan sama sekali ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan Islam saat itu tidak mengajarkan sama-sekali ilmu-ilmu umum.⁵

Pada awal munculnya sistem pendidikan Barat, lembaga pendidikan Islam menolak adanya pemasukan unsur-unsur Barat. Hal ini dikarenakan pada saat itu para pendidik pesantren menganggap bahwa paham ilmuwan Barat di bidang pendidikan dianggap sebagai ancaman yang dominan, sehingga orang-orang Islam cenderung melindungi identitas dan otentisitas ajaran agamanya.⁶

⁵Tomo Parangrangi, "Sekularisme dalam Perkembangan Islam", *Artikel*, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2010). hlm 15.

⁶Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan*

Pada awal abad ke-20, muncul ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang berawal dari ketidakpuasan dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam mulai melakukan serangkaian perubahan yang disesuaikan dengan ide-ide pembaharuan. Salah satu unsur yang penting dalam gerakan pembaharuan Islam di bidang pendidikan ialah mulai mencoba menghapus dikotomi pendidikan Islam dengan cara memasukkan mata pelajaran non-keagamaan, sehingga hasil dari ide pembaharuan Islam dalam pendidikan adalah mulai munculnya madrasah.⁷

Keberhasilan kaum reformis⁸ dalam memperkenalkan madrasah mengakibatkan muncul stigma negatif pada pesantren. Pesantren yang telah lama beroperasi, dianggap

Pendidikan Islam, Cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 11.

⁷*Ibid.*, hlm. 50.

⁸Dalam hal ini, contoh organisasi reformis yang dimaksud adalah Muhammadiyah (1912) dan Al-Irsyad (1914).

heterodok dan tidak lagi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat, sehingga perlu diganti dengan sistem kelembagaan baru yang dikenal dengan madrasah.⁹

Menghadapi usaha pembaruan pendidikan kaum reformis, para pendidik pesantren mulai berusaha dalam memperbaiki pendidikan Islam dengan cara mengambil usaha yang sama namun melalui pendekatan yang berbeda. Dengan mempertahankan nilai-nilai dari pesantren, kalangan pendidik pesantren mulai membuka sistem madrasah. Hanya saja madrasah mereka tidak langsung dirancang seperti kaum reformis, karena sistem dan materi pembelajarannya masih bergaya pesantren. Ketika kaum reformis melakukan usaha pembaharuan pendidikan Islam melalui pembentukan organisasi modern, para kaum tradisional membentuk sebuah organisasi yang mawadahi kepentingan tradisional bernama Nadhlatul Ulama (NU).

⁹Mahrus As'ad, "Pembaruan Pendidikan Islam Nadhlatul Ulama", *Nizham*, (Vol. 3, No. 02, 2014). hlm. 55-56.

Setelah NU berdiri pada tahun 1926, NU memiliki program permanen yang mengurus bidang madrasah dan sekolah yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pendidikan NU di tingkat Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Pengurus Wakil Cabang.¹⁰

Pembentukan LP. Ma'arif merupakan wujud dalam pembaruan pendidikan NU. Hal ini yang menyebabkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penghapusan pendidikan dikotomis yang dilakukan LP. Ma'arif sehingga berdampak pada perkembangan LP. Ma'arif tahun 1938-1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dirumuskan oleh Louis Gottschalk dengan empat tahapan penelitian. Tahap *pertama*, heuristik yang berarti mencari dan mengumpulkan sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder; tahap

¹⁰*Ibid.*, hlm. 176-177.

kedua yaitu verifikasi atau kritik sumber terhadap sumber-sumber yang diperoleh; tahap *ketiga*, interpretasi yang berarti menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya untuk dianalisis yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu rangkaian peristiwa; dan tahap *keempat*, historiografi yang merupakan tahap terakhir berupa penelitian sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN PENDIDIKAN ISLAM AWAL ABAD XX

Sebelum masuknya sistem pendidikan Islam modern, pembelajaran agama Islam pada awalnya masih bersifat sederhana yang dapat disebut sebagai pengajian Alquran dan pembelajaran kitab-kitab klasik. Pengajian Alquran biasanya dilakukan di langgar-langgar, serambi masjid, dan rumah guru untuk belajar bahasa Arab agar dapat melafalkan ayat Alquran. Seiring perkembangannya, tempat-tempat inilah yang menjadi embrio

terbentuknya lembaga pendidikan pesantren.¹¹

Pembentukan pondok pesantren pada umumnya merupakan strategi umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya terhadap pengaruh Barat dan sebagai akibat tidak cukupnya masjid dan rumah kyai untuk menampung jumlah murid. Selain itu, pembentukan pondok pesantren didorong oleh keinginan untuk mengintensifkan pembelajaran agama kepada murid-muridnya.¹²

Kyai memainkan peranan penting dalam perkembangan pesantren. Selain sebagai seorang guru, ia bertindak sebagai pembimbing spiritual bagi mereka yang taat dan memberi nasihat dalam masalah bagi kehidupan pribadi mereka, serta menjadi pemimpin dalam ritual-ritual keagamaan.¹³

¹¹Mahrus As'ad, *op.cit.*, hlm. 52.

¹²Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, ed. 1 cet.8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). hlm. 212.

¹³Martin van Bruinessen (terj), *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa*:

Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia mengakibatkan terjadinya kemunduran pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan adanya berbagai pembatasan dari Pemerintah Belanda terhadap gerak-gerik pesantren seperti pengadaan ujian bagi calon guru untuk mendapatkan izin mengajar, pendataan guru-guru agama, hingga penyensoran buku-buku yang berasal dari luar negeri.¹⁴ Kemunduran pendidikan Islam semakin terlihat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pendidikan Barat sekuler untuk menghadapi perkembangan pendidikan muslim melalui Politik Etis.¹⁵

Pada awal abad ke-20, beberapa pemimpin muslim modernis mulai melawan model pendidikan sekuler Belanda. Beberapa alumni universitas Al-

Pencarian Wacana Baru, Cet-5, (Yogyakarta: LKiS, 2008). hlm. 17.

¹⁴Mahrus As'ad, *op.cit.*, hlm. 54-55.

¹⁵Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*, (Jakarta: INIS, 2004). hlm. 20.

Azhar Mesir mulai mendirikan sistem madrasah di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Munculnya gagasan mengenai pembentukan madrasah oleh kaum modernis diawali oleh tereksposnya pikiran Muhammad Abduh (1865-1935), Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) yang memicu mereka dalam gerakan modernis Islam dan melengkapi mereka mengenai kegiatan keagamaan.¹⁶

Kemunculan madrasah yang didirikan oleh kaum modernis sebenarnya merupakan bentuk kritik yang dilontarkan kepada pesantren yang dianggap sebagai tradisi lokal yang heterodok, sehingga madrasah yang didirikan oleh kaum modernis menurutnya merupakan bentuk Islamisasi terhadap lembaga pendidikan pesantren karena di dalamnya mengandung unsur Hindu-Buddha.¹⁷ Akibat kritik yang dilontarkan kaum modernis, muncul

¹⁶Muhammad Sirozi, *op.cit.*, hlm. 37.

¹⁷Mahrus As'ad, *op.cit.*, hlm. 57.

konflik antara kaum tradisional¹⁸ dan kaum modernis. Menurut kaum tradisional, pesantren tidak hanya lembaga pendidikan dalam arti sempit, melainkan juga sebagai “madrasah” sebagai wujud pemeliharaan nilai-nilai budaya Islam yang bercorak khas dan unik. Menurut pandangan mereka, memasukkan unsur-unsur baru pada pendidikan pesantren tidaklah begitu masalah demi kemajuan pendidikan, hanya saja mereka tidak terima jika harus meninggalkan unsur-unsur kebaikan dalam pesantren.¹⁹

Pada bulan Januari 1926 sebelum Kongres Al-Islam di Bandung, organisasi-organisasi modernis di Cianjur mengirim utusan yang terdiri dari dua orang ke Mekah. Satu bulan kemudian, Kongres Al-Islam tidak menyambut baik usulan yang dikemukakan Kyai Wahab terkait praktik keagamaan yang dibawa oleh delegasi Indonesia ke Mekah. Penolakan tersebut

dikarenakan kaum modernis menyambut baik pembersihan dalam kebiasaan ibadah agama di Arab Saudi, sehingga Kongres Al-Islam di Bandung tidak membuahkan hasil bagi kaum tradisional. Hal ini yang menyebabkan kaum tradisional membentuk Komite Hijaz yang menjadi cikal bakal terbentuknya Nadhlatul Ulama (NU)

Pasca pembentukan NU, fokus perhatian NU pada bidang pengajaran merupakan konsekuensi terhadap kaum modernis dalam mempertahankan ajaran Aswaja. Hal ini yang membuat NU melakukan dinamisasi guna mencegah ketertinggalan dan merespon modernisasi dengan membentuk lembaga yang bertugas menangani masalah pendidikan yang dinamakan Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP. Ma’arif) guna menghadapi tuntutan dan tantangan zaman.²⁰

B. AWAL LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF

Pada tanggal 19 September 1929, dibentuk secara formal

¹⁸Dalam hal ini yang dimaksud kaum tradisional adalah para kyai dan ulama-ulama tradisional.

¹⁹Mahrus As’ad, *op.cit.*, hlm. 58.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Hoofdbestuur Nadhlatoel Oelama (HBNO) bagian Ma'arif (LP. Ma'arif) yang dipimpin oleh KH. Abdullah Ubaid sebagai Presiden Ma'arif yang pertama di Surabaya. Tugas pokok pertama setelah pembentukan badan hukum ini adalah konsolidasi dan penyebaran organisasi.²¹

Setelah pembentukan HBNO bagian Ma'arif (LP. Ma'arif) di Surabaya pada tahun 1929, NU mulai berupaya menghapus dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum pada madrasah/ sekolah NU.²² Hal ini dibuktikan pada tahun 1929, LP. Ma'arif membuka Madrasah Nadhlatul Wathan cabang Malang yang memiliki 250 siswa dengan enam jenjang kelas, mempunyai gedung bertingkat senilai f 7.000,-.²³

²¹Mardjiin Syam, dkk, *Sejarah Pendidikan Swasta di Indonesia (Lembaga Pendidikan Ma'arif N.U)*, (Jakarta: BP3K, 1976). hlm. 97.

²²Harapandi Dahri, "Mencari Relevansi: Gagasan Pendidikan Nondikotomik", (*Penamas*, Vol. XXI, No. 2, 2008). hlm. 200.

²³Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan*

Selain itu Nadhlatul Wathan cabang Malang juga mendirikan madrasah di tingkat kecamatan, diantaranya yaitu di kecamatan Pakis dengan jumlah siswa 150 orang, kecamatan Pujon sejumlah 190 siswa, kecamatan Batu sejumlah 70 siswa, kecamatan Kacuk dengan 90 siswa, kecamatan Karanglo sejumlah 110 siswa, kecamatan Bulu Lawang sejumlah 160 siswa, dan kecamatan Singosari sejumlah 200 orang.²⁴

Pada tahun 1930-an madrasah NU mulai berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai pendirian Nadhlatul Wathan sebanyak 18 buah. Delapan belas madrasah tersebut memiliki 924 siswa laki-laki, 474 siswa perempuan, 35 guru laki-laki, 14 guru wanita dengan 7 buah gedung berstatus wakaf, 2 gedung pinjaman, dan 8 gedung berstatus sewa. Madrasah tersebut berada di Surabaya antara lain Hidayatul

Nadhlatul Ulama, (Sala: Jatayu Sala, 1985). hal. 85.

²⁴Kholid Mawardi, "Mazhab Sosial Keagamaan: Sejarah Nadhlatul Ulama 1936-1945", *Tesis*, (Yogyakarta: UGM, 2005). hlm. 53-54.

Wathan Jagalan, Akhul Wathan Wonokromo, Nadhlatul Wathan Pancur Keling.²⁵

Pada awal perkembangan LP. Ma'arif, terdapat hambatan dalam sistem pengorganisasian. Kurikulum pada awal perkembangan sekolah Ma'arif bersifat sederhana karena masih didominasi mata pelajaran agama dan sedikit dalam menambahkan mata pelajaran umum. Contohnya pada kurikulum madrasah Nadhlatul Wathan mata pelajaran yang diajarkan pada kelas I adalah menulis halus Arab, menyusun kalimat, membaca Alquran, tajwid dan menghafal tuntunan agama dalam bahasa Jawa. Mata pelajaran kelas II adalah pendalaman materi kelas I, ditambah dengan nahwu-saraf, tauhid, hisab, dan membaca kitab. Mata pelajaran kelas III adalah pendalaman dari materi kelas II, sedangkan pada kelas IV terdapat tambahan mata pelajaran ilmu bumi (geografi).²⁶

²⁵*Ibid.*

²⁶ Kholid Mawardi, *op.cit.*, hlm. 60.

Munculnya gagasan pembaruan pendidikan NU bermula ketika KH. A. Wahid Hasyim menggagas pembaharuan kurikulum pendidikan modern.²⁷ KH. A. Wahid Hasyim melakukan percobaan dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti aritmatika, sejarah, ilmu bumi, dan ilmu pengetahuan alam. Selain mengajarkan mata pelajaran bahasa Arab, ia juga menambahkan mata pelajaran bahasa Belanda dan Inggris.²⁸ Usaha modernisasi pendidikan yang dilakukan LP. Ma'arif mulai dilakukan sebelum Mukhtamar NU ke-13 di Menes, Jawa Barat. Pada tanggal 11-12 Februari 1938 diadakan Konferensi Daerah Jawa Timur, bertempat di daerah Singosari, Malang yang dihadiri oleh Komisi Perguruan Ma'arif, antara

²⁷Muttaqin, "Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah" *Jurnal Nur El-Islam*, (Vol. 4, No. 1, 2017). hlm. 22.

²⁸Alfi Nurfadhilah, "Madrasah Nizhamiyah: Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng", *skripsi*, (Bandung: UPI, 2019). hlm. 70.

lain K. Abdullah Ubaid, KH. A. Wahid Hasyim, KH. Abdullah Fakhri, dan lain-lain. Konferensi ini menghasilkan sebuah rancangan peraturan (*reglement*) mengenai susunan sekolah/ madrasah NU yang nantinya akan disampaikan pada Mukhtar NU ke-13 pada tanggal 11-16 Juni tahun 1938. Adapun susunan madrasah/ sekolah yang diputuskan pada saat konferensi besar Ma'arif adalah Madrasah Awaliyah (2 tahun), Madrasah Ibtidaiyah, (3 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Muallimin Wustha (3 tahun), dan Madrasah Muallimin Ulya (3 tahun) yang menjadi penanda modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh LP. Ma'arif.²⁹

C. DAMPAK PENGHAPUSAN PENDIDIKAN DIKOTOMIS TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF TAHUN 1938-1975

Setelah LP. Ma'arif melakukan *reglement* mengenai susunan madrasah-madrasah umum

NU melalui KH. A. Wahid Hasyim, NU mulai serius dalam menyebarkan jenjang sekolah/ madrasah ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, dalam bidang kurikulum, pasca modernisasi yang dilakukan oleh KH. A. Wahid Hasyim, terdapat penyempurnaan dalam mata pelajaran umum sebagai dampak penghapusan dikotomi dalam pendidikan seperti tambahan dalam mata pelajaran geografi, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, sejarah, ilmu alam, ilmu hayat, gerak badan (olahraga), kerajinan tangan, dan lain-lain.³⁰

Pasca kemerdekaan, Upaya Ma'arif dalam pengembangan pendidikan NU, tidak hanya berpusat terhadap pendidikan formal tetapi juga mulai fokus dalam pendidikan pra sekolah. Hal ini dibuktikan pada Mukhtar ke-18 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1950. Pada saat itu, Muslimat sangat aktif dalam mengajukan aspirasi dalam upaya memperhatikan pendidikan Taman Kanak-kanak atau Raudhatul

²⁹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara, 1979). hlm. 241-242.

³⁰Mardjiin Syam, *op.cit.*, hlm. 127-128.

Athfal (RA), sehingga hasil dari Mukhtar tersebut, pendidikan RA mulai bekerja sama dengan LP. Ma'arif.³¹

Pada tanggal 23 sampai 26 Februari 1954, diadakan Konferensi Besar Ma'arif di Semarang. Pada konferensi ini, pokok-pokok yang dibahas adalah membuat rancangan baru mengenai susunan sekolah dan madrasah NU. Rancangan dalam sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah NU pada dasarnya mengikuti kurikulum yang berlaku pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama, namun disesuaikan dengan kurikulum yang ditentukan oleh NU bagian Ma'arif.

Adapun susunan sekolah dan madrasah yang dirancang NU, diantaranya: Raudhatul Athfal (Taman Kanak-kanak) dengan lama belajar 3 tahun, SR (Sekolah Rendah) dengan lama belajar 6 tahun, SMP NU dengan lama belajar 3 tahun, SMA NU, dengan lama belajar 3 tahun, SGB (Sekolah Guru

B) NU, dengan lama belajar 4 tahun, SGA (Sekolah Guru A) NU dengan lama belajar 3 tahun, MMP (Madrasah Menengah Pertama) NU dengan lama belajar 3 tahun, MMA (Madrasah Menengah Atas) NU dengan lama belajar 3 tahun, dan Muallimin/ Muallimat NU, dengan lama belajar 5 tahun³²

Proses penyempurnaan pada LP. Ma'arif juga terlihat pada saat NU telah tergabung dalam partai politik. Berdasarkan keputusan Kongres ke-12 di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 1959, diputuskan bahwa LP. Ma'arif menyatakan bahwa akan bernaung dalam partai politik NU.³³ Dikarenakan Ma'arif yang merupakan lembaga pendidikan mulai bernaung dalam partai politik, maka NU mengubah kedudukan Ma'arif sebagai badan otonom, sehingga Ma'arif mulai menamakan dirinya secara lengkap sebagai

³²Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 244.

³³ANRI, 1385, Berisi Pernyataan PP LP. Ma'arif Tentang Peraturan Dasar Organisasi, (PBNU: 1965).

³¹Mardjiin Syam, *op.cit.*, hlm. 129.

“Lembaga Pendidikan Ma’arif Nadhlatul Ulama”.³⁴

Pasca pengubahan LP. Ma’arif menjadi badan otonom, fokus NU dalam mengembangkan pendidikan mulai ditingkatkan hingga perguruan tinggi. Hal ini terlihat ketika pada tahun 1960-an, terdapat perguruan tinggi dibawah naungan LP. Ma’arif seperti Fakultas Hukum dan Ekonomi NU di Bandung, Kuliyyatul Qadla di Solo, dan Fakultas Tarbiyah wat Ta’lim NU di Malang (sekarang menjadi Universitas Sunan Giri).³⁵

Dikarenakan LP. Ma’arif bernaung pada partai politik NU, pada awal Orde Baru, perkembangan LP. Ma’arif mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pasca pemilu 1971, muncul berbagai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap NU yang berdampak pada penurunan jumlah anggota. Banyak sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan LP. Ma’arif menyembunyikan keterkaitan dengan

NU karena takut mendapatkan perlakuan diskriminatif. Saat itu, tidak ada lagi istilah MINU (Madrasah Ibtidaiyah NU) maupun SD NU. Mereka mengganti nama sekolah menjadi nama-nama tokoh, seperti sekolah Wahid Hasyim. Selain itu, karena alasan yang sama, pada tahun 1972, Universitas NU di Malang mengganti namanya menjadi Universitas Sunan Giri.³⁶ Untuk mengurangi kecurigaan pemerintah, pada tahun 1971 LP. Ma’arif cabang purbalingga membentuk Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (Yappi). Pendirian yayasan ini secara organisatoris maupun administratif lepas dari ikatan pada Parpol, Golkar, maupun Ormas lain sehingga yayasan ini bersifat independen.³⁷

Pasca pendirian Yappi, masalah-masalah dalam bidang pendidikan Islam pada masa Orde Baru bukan hanya berlaku pada LP.

³⁶Andree Feillard (terj), *NU vis-à-vis Negara: Pencarian, Isi, Bentuk, dan Makna*, cet-3, (Yogyakarta: LKiS, 2013). hlm. 277.

³⁷ANRI, 1405, Berisi tentang surat-surat mengenai pendirian Jajasan Pendidikan dan Penyiaran Islam, (PBNU, 1972).

³⁴Mardjiin Syam, *op.cit.*, hlm. 147.

³⁵*Ibid.*, hlm. 149.

Ma'arif, melainkan mencapai lingkup nasional. Hal ini dikarenakan pada saat itu, pemerintah membagi kewenangan antara Kemdikbud dan Kemenag, berisi bahwa pendidikan umum dikelola oleh Kemdikbud dan pendidikan agama dikelola oleh Kemenag. Situasi ini mengakibatkan munculnya dikotomi baru, antara pendidikan umum dan pendidikan agama yang berakibat adanya dualisme pendidikan di Indonesia.³⁸

Karena adanya ketimpangan antara sekolah umum dan madrasah dalam segi pengetahuan umum dan agama, pada tahun 1975, dikeluarkannya SKB Tiga Menteri antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri mengenai penyetaraan status madrasah dan sekolah umum, sehingga dianggap

menjadi momentum terhapusnya dikotomi ilmu agama dan umum.³⁹

Setelah terbitnya SKB Tiga Menteri LP. Ma'arif semakin berpotensi untuk meningkatkan jumlah madrasah-madrasah NU. Oleh karena itu, pada tanggal 5 sampai 8 Mei 1975, diselenggarakan Konferensi Ma'arif NU di Jakarta yang membahas tentang usaha-usaha LP. Ma'arif dalam bidang pendidikan seperti meningkatkan mutu pendidikan dan madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, mengadakan pendidikan keterampilan, dan menambah berdirinya sekolah-sekolah maupun madrasah-madrasah dibawah naungan LP. Ma'arif.⁴⁰

KESIMPULAN

Pada bagian akhir peneliti menyimpulkan secara singkat guna memberikan gambaran secara umum dari apa yang telah peneliti paparkan

³⁸Sholehuddin, "Politik Kelembagaan Islam Masa Orde Baru: Sebuah Inspirasi dalam Mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementerian Agama tentang Pendidikan Madrasah di Era Reformasi", *Artikel*, (Surabaya: Widwaswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2014). hlm. 7.

³⁹Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 8-9.

⁴⁰ANRI, 1409, Berisi tentang Keputusan Komisi A Ma'arif pada Konbes NU, di Jakarta, (PBNU: 1975).

sebelumnya. Pada awal pendirian LP. Ma'arif, mulai dilakukan usaha dalam menghapus pendidikan dikotomis melalui pendirian madrasah-madrasah. Namun pada awal pendiriannya, terdapat beberapa tantangan yaitu kurangnya sistem pengorganisasian, dan masih sedikit dalam menambahkan mata pelajaran umum.

Setelah modernisasi pendidikan oleh KH. A. Wahid Hasyim pada tahun 1938 mengenai susunan jenjang pendidikan sekolah, secara tahap demi tahap sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan LP. Ma'arif terus mengalami peningkatan baik dari segi kurikulum maupun jenjang pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kurun waktu tahun 1975-1938, LP. Ma'arif telah menaungi jenjang pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

- ANRI, 1385, Berisi Pernyataan PP LP. Ma'arif Tentang Peraturan Dasar Organisasi, PBNU: 1965.
ANRI, 1405, Berisi tentang surat-surat mengenai pendirian

Jajasan Pendidikan dan Penyiaran Islam, PBNU, 1972.

B. Buku, Artikel, dan Karya Tulis Ilmiah

- Alfi Nurfadhilah, "Madrasah Nizhamiyah: Peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pembaharuan Pendidikan Islam di Pesantren Tebuireng", *skripsi*, Bandung: UPI, 2019.
- Andree Feillard (terj), *NU vis-à-vis Negara: Pencarian, Isi, Bentuk, dan Makna*, cet-3, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nadhlatul Ulama*, Sala: Jatayu Sala, 1985.
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2007.
- Harapandi Dahri, "Mencari Relevansi: Gagasan Pendidikan Nondikotomik", *Penamas*, Vol. XXI, No. 2, 2008.
- Kholid Mawardi, "Mazhab Sosial Keagamaan: Sejarah Nadhlatul Ulama 1936-1945", *Tesis*, Yogyakarta: UGM, 2005.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1979.
- Mahrus As'ad, "Pembaruan Pendidikan Islam Nadhlatul Ulama", *Nizham*, Vol. 3, No. 02, 2014.
- Mardjiin Syam, dkk, *Sejarah Pendidikan Swasta di*

- Indonesia (Lembaga Pendidikan Ma'arif N.U), Jakarta: BP3K, 1976.
- Martin van Bruinessen (terj), *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Cet-5, (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, cet-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*, Jakarta: INIS, 2004.
- Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Muttaqin, "Pemikiran dan Manajemen Pendidikan NU dan Muhammadiyah" *Jurnal*
- Nur El-Islam*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Sholehuddin, "Politik Kelembagaan Islam Masa Orde Baru: Sebuah Inspirasi dalam Mengembangkan Mata Diklat Kebijakan Kementerian Agama tentang Pendidikan Madrasah di Era Reformasi", *Artikel*, Surabaya: Widyaswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2014.
- Tomo Parangrangi, "Sekularisme dalam Perkembangan Islam", *Artikel*, Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin, 2010. hlm 15.
- Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, ed. 1 cet.8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pembimbing TAS

Yogyakarta, 08 November 2019

Reviewer


Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198901 1 001


Ririn Darini, S.S., M.Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001